

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan siri. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.88
Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Rupiah per Bulan)

Tahun/ Status Wilayah		Makanan	Bukan Makanan	Total
2009	Kota	219.238	217.742	436.980
	Desa	169.502	116.847	286.349
	Kota+Desa	200.478	179.685	380.163
2010	Kota	244.457	224.564	469.021
	Desa	189.000	118.345	307.345
	Kota+Desa	223.539	184.499	408.038
2011	Kota	281.107	316.024	597.131
	Desa	208.082	164.619	372.701
	Kota+Desa	242.829	236.661	479.490
2012	Kota	296.389	376.200	672.589
	Desa	207.479	187.305	394.784
	Kota+Desa	249.785	277.187	526.973
2013	Kota	325,319	388,442	713,760
	Desa	252,159	190,741	442,900
	Kota+Desa	286,962	284,790	571,752

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, BKP Provinsi Jawa Timur

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009-2013 di Jawa Timur, dalam lima tahun terakhir rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur mengalami peningkatan, yang semula Rp. 380.163 per kapita sebulan di tahun 2009 dan di tahun 2013 meningkat menjadi Rp 571.752.

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law).

Tabel 2.89
Persentase Pengeluaran Rumahtangga
dirinci Menurut Pengeluaran Makanan & Non Makanan
Jawa Timur Tahun 2009-2013

Status Wilayah	Makanan		Bukan Makanan		Total	
	Jumlah (Rp)	Persen	Jumlah (Rp)	Persen	Jumlah (Rp)	Persen
Kota	325,319	45.58	388,442	54.42	713,760	100
Desa	252,159	56.93	190,741	43.07	442,900	100
Kota+Desa	286,962	50.19	284,790	49.81	571,752	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013 proporsi pengeluaran non makanan sebesar 49,81 persen dan untuk makanan sebesar 50,19 persen. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan di perkotaan sebesar 54,42 persen lebih besar dibandingkan pedesaan sebesar 43,07 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat, namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan ini mungkin dikarenakan makin tidak terkendalinya perubahan harga-harga barang yang tidak sebanding dengan perkembangan pendapatan. Hal ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

2.1.4.1.2 Pertanian

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.90
Perkembangan NTP Jawa Timur Tahun 2009-2013

Nilai Tukar Petani	2009	2010	2011	2012	2013
NTP. Jawa Timur	98,19	98,74	101,65	102,16	103,19
Indeks Yang di Terima	118,88	127,78	139,26	147,27	151,12
Indeks yang di Bayar	121,04	129,40	136,99	144,15	146,57
Tan. Pangan	92,56	94,60	101,13	102,34	103,54
Indeks Yang di Terima	112,37	123,14	139,79	149,29	164,88
- Padi	111,47	125,36	143,27	155,36	144,10
- Palawija	113,39	120,61	135,83	142,36	148,06
Indeks yang di Bayar	121,39	130,14	138,19	145,86	141,91
Hortikultura	106,46	110,60	111,03	109,93	108,12
Indeks Yang di Terima	128,77	143,66	152,93	159,53	132,41
- Sayuran	132,41	153,38	161,01	172,00	146,96
- Buah-buahan	126,93	138,75	148,83	153,22	124,59
Indeks yang di Bayar	120,89	129,87	137,76	145,10	131,88

Sumber : BPS Jawa Timur, 2013

Perkembangan kesejahteraan masyarakat pedesaan juga menunjukkan adanya peningkatan yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur (2007 = 100) berada diatas angka 100. Rerata NTP sektor pertanian Jawa Timur selama tahun 2009 - 2013 mencapai 100,73 yang diperoleh dari rasio indeks yang diterima petani sebesar 132,90 terhadap indeks yang dibayar petani sebesar 131,79. Rerata NTP tanaman pangan selama lima tahun terakhir mencapai 98,86 dengan rasio indeks yang diterima petani sebesar 133,53 (pada jenis usaha tani padi sebesar 129,98 dan palawija sebesar 135,91) terhadap indeks yang dibayar petani sebesar 131,73. Rerata NTP hortikultura selama lima tahun terakhir mencapai 107,49 dengan rasio indeks yang diterima petani sebesar 137,98 (pada jenis usaha tani sayuran sebesar 146,64 dan buah-buahan sebesar 133,52) terhadap indeks yang dibayar petani sebesar 129,58.

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan secara relatif adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Indikator tersebut juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Selain itu dengan Indeks Nilai Tukar Nelayan kita dapat menentukan daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 menunjukkan angka peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 141,26 (2009); 143,27 (2010); 148,46 (2011); 151,15 (2012); dan 156,34 (2013).

Tabel 2.91
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013 (2005=100)

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTP)	141,26	143,27	148,46	151,15	156,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : Penghitungan NTN s/d bulan Nopember

Perkembangan NTN setiap bulannya masih fluktuatif sepanjang tahun, dan sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca, ini memberikan indikasi belum intensifnya pengelolaan pasca panen produk perikanan, karena harga ikan justru lebih murah ketika musim panen tiba. Pengembangan agribisnis perikanan masih sangat diperlukan, demi terjaganya stabilitas harga ikan. Selain itu peningkatan kualitas hasil tangkapan juga perlu mendapat perhatian, sehingga ikan masih dalam keadaan segar dan utuh ketika sampai ditangan konsumen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Perhubungan

1. Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api

Minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan massal Kereta Api sangat besar, terutama nampak menjelang mudik dan arus balik pasca hari raya. terselesaikannya jalur rel Double Track di Pantura Jawa, juga patut dilihat sebagai peluang terjadinya perpindahan angkutan barang dari angkutan jalan menjadi angkutan Kereta Api yang lebih efisien. Hal tersebut juga menjadi potensi bisnis dibidang perkeretaapian untuk tumbuh besar. Saat ini sudah dimungkinkan investor dapat membangun perusahaan kereta tersendiri, baik kereta penumpang maupun kereta barang. Sudah saatnya Jawa Timur menentukan jenis prasarana angkutan transportasi massal apa yang akan digunakan, berbasis Tol atau berbasis Kereta Api.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu konektivitas untuk memperlancar distribusi logistik nasional melalui wilayah Utara pulau Jawa, diperlukan adanya perpanjangan jalur Kereta Api Double Track yang semula Jakarta - Surabaya (Ps. Turi) menjadi Jakarta - Surabaya (Ps. Turi - Dermaga Pelabuhan Tj. Perak) – Probolinggo (Pelabuhan Tj. Tembaga) – Banyuwangi (Pelabuhan Tj. Wangi). Jalur Kereta Api Double Track ini merupakan cikal-bakal terjadinya transportasi multimoda di Jawa Timur - Nasional. Namun

rencana ini harus segera tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Propinsi untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Begitu juga dengan Rencana Induk Provinsi terkait Pengembangan Pelabuhan, Bandara dan sistem jaringan jalan.

Tabel 2.92
Data Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	DAOP 7 MADIUN						
	KA Eksekutif	orang	169.035	204.458	202.338	195.308	218.421
	KA Bisnis	orang	227.587	223.406	213.974	151.397	86.364
	KA Ekonomi / Lokal	orang	2.938.567	3.077.492	3.030.733	2.667.016	2.490.631
	JUMLAH	orang	3.335.189	3.505.356	3.447.045	3.013.721	2.795.416
2	DAOP 8 SURABAYA						
	KA Eksekutif	orang	306.758	807.673	687.523	769.103	852.508
	KA Bisnis	orang	245.104	594.118	470.994	482.463	452.149
	KA Ekonomi	orang	827.380	2.058.422	1.654.491	1.324.517	1.399.262
	KA Lokal	orang	2.462.215	9.257.265	8.194.395	6.606.633	4.691.904
	JUMLAH	orang	3.841.457	12.717.478	11.007.403	9.182.716	7.395.824
3	DAOP 9 JEMBER						
	KA Eksekutif	orang	116.573	108.429	118.334	149.957	121.897
	KA Bisnis	orang	209.587	165.736	161.117	135.042	127.283
	KA Ekonomi	orang	732.835	792.614	776.320	790.778	602.903
	KA Lokal	orang	778.029	705.719	689.080	699.786	601.058
	JUMLAH	orang	1.837.024	1.772.498	1.744.851	1.775.563	1.453.141
TOTAL JAWA TIMUR		orang	9.013.670	17.995.332	16.199.299	13.972.000	11.644.381

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Saat ini telah terjadi trend pertumbuhan yang signifikan baik pada pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi maupun Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, sehingga perpanjangan jalur Kereta Api Double Track yang mempunyai efisiensi angkut yang tinggi dapat saling terintegrasi dan menjadi daya saing Jawa Timur - Nasional menyambut Persaingan Global.

2. Arus Penumpang melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

Perkembangan perekonomian menuntut pergerakan barang yang semakin banyak volumenya, dan semakin cepat. Pada empat pelabuhan di Jawa Timur digambarkan terjadi peningkatan volume peti kemas yang bongkar muat yang tinggi, sehingga diperlukan lahan pelabuhan yang cukup luas dan efisiensi aktivitas pelabuhan yang dikelola oleh operator. Tanpa itu semua, dikuatirkan kapal-kapal besar dari berbagai negara lebih memilih untuk bongkar muat

di negara tetangga yang pada kenyataannya dapat memberikan pelayanan pelabuhan yang lebih efisien.

Untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan, Pemerintah Pusat telah menunjuk Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) yang bertugas mengembangkan bisnis dari sebuah pelabuhan dan juga, berwenang mengaudit kinerja dari sebuah pelabuhan umum.

Tabel 2.93
Arus Penumpang melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	PELABUHAN TANJUNG PERAK						
	NAIK	orang	510.795	489.637	506.871	432.901	454.546
	TURUN	orang	476.957	428.399	514.445	466.615	513.277
	JUMLAH TJ. PERAK	orang	987.752	918.036	1.021.316	899.516	967.823
2	PELABUHAN GRESIK						
	NAIK	orang	49.755	49.949	52.868	51.689	53.240
	TURUN	orang	39.756	37.732	45.364	41.831	43.923
	JUMLAH GRESIK	orang	89.511	87.681	98.232	93.520	97.162
3	PELABUHAN PROBOLINGGO						
	NAIK	orang	-	-	-	-	-
	TURUN	orang	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROBOLINGGO	orang	-	-	-	-	-
4	PELABUHAN TANJUNG WANGI						
	NAIK	orang	4.233	5.252	6.648	5.483	5.702
	TURUN	orang	3.780	3.804	5.729	4.504	4.729
	JUMLAH TJ. WANGI	orang	8.013	9.056	12.377	9.987	10.432
TOTAL JAWA TIMUR		orang	1.085.276	1.014.773	1.131.925	1.003.023	1.075.416

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Pelabuhan Probolinggo dikhususkan sebagai pelabuhan multipurpose yang hanya melayani kegiatan bongkar muat barang sehingga tidak terdapat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang

Harapan peningkatan daya saing Jawa Timur kedepan adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan oleh BPWS melalui Kerjasama Pemerintah Swasta, sehingga membuka peluang bagi pengelola Pelabuhan Internasional untuk mengikuti tender melalui mitra perusahaan lokal. Sehingga dengan skema seperti itu, diharapkan performance pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi professional, tidak high cost dan tidak lagi menambah utang negara, namun bisa membuka peluang yang lebih besar bagi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan perusahaan konstruksi lokal maupun BUMD yang bergerak di bidang konstruksi untuk ikut dalam pembangunan proyek-proyek besar.

Pada intinya, penyediaan infrastruktur transportasi Pelabuhan yang memadai sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena bukan hanya pelaku bisnis saja yang dapat memperoleh manfaat, tapi juga harus rakyat di seputar pelabuhan dan juga perekonomian Negara.

3. Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

Di Pulau Jawa, hanya Provinsi Jawa Timur belum mempunyai Bandara Internasional Sipil/Komersial, sementara Bandara Enclave yang ada sangat sulit untuk dikembangkan maupun diminati oleh para investor. Mengingat jumlah penumpang Bandara Juanda sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya, maka bandara tersebut seharusnya sudah diperluas dari 477,3 Ha menjadi 1.000 Ha. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik daerah tentunya sangat mungkin dilakukan karena traffic-nya sudah tinggi dan yang memiliki potensi peningkatan yang tinggi dengan gambaran keuntungannya sudah lebih jelas.

Tabel 2.94
Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	BANDARA JUANDA						
	INTERNASIONAL	Orang	1.105.632	1.217.679	1.325.863	1.505.959	1.822.604
	- Naik	Orang	568.531	647.685	722.039	771.502	901.187
	- Turun	Orang	537.101	569.994	603.824	734.457	921.417
	DOMESTIK	Orang	8.823.707	9.980.846	11.401.383	13.798.626	15.839.989
	- Naik	Orang	4.565.953	5.103.305	5.869.879	7.271.174	7.934.139
	- Turun	Orang	4.257.754	4.877.541	5.540.504	6.527.452	7.905.850
	JUMLAH JUANDA	Orang	9.929.339	11.198.525	12.727.246	15.304.585	17.662.593
2	BANDARA ABD. SALEH						
	DOMESTIK	Orang	261.010	363.059	463.225	509.495	526.036
	- Naik	Orang	128.553	178.586	230.785	253.496	260.288
	- Turun	Orang	132.457	184.473	232.440	255.999	265.748
		JUMLAH ABD. SALEH	Orang	261.010	363.059	463.225	509.495
2	BANDARA BLIMBINGSARI						
	DOMESTIK	Orang	-	-	7.313	20.439	44.052
	- Naik	Orang			3.677	9.980	21.685
	- Turun	Orang			3.636	10.459	22.367
		JUMLAH Banyuwangi	Orang	-	-	7.313	20.439
TOTAL JAWA TIMUR		orang	10.190.349	11.561.584	13.197.784	15.834.519	18.232.681

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Launching penerbangan komersial perdana di bandara Blimbingsari Banyuwangi adalah 29 Desember 2010.

Tabel 2.95
Arus Perdagangan melalui Bandara di Jawa Timur

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	BANDARA JUANDA						
	- Impor	Kg	8.496.193	10.098.489	9.798.461	10.309.450	16.221.221
	- Ekspor	Kg	8.593.806	9.632.158	8.964.965	9.511.607	11.462.767
TOTAL JAWA TIMUR		Kg	17.089.999	19.730.647	18.763.426	19.821.057	27.683.988

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	BANDARA JUANDA						
	- Bongkar	Kg	22.112.574	26.460.270	37.465.395	35.063.411	55.419.165
	- Muat	Kg	25.687.688	30.230.231	49.186.810	51.344.021	72.136.436
	TOTAL JUANDA	Kg	47.800.262	56.690.501	86.652.205	86.407.432	127.555.601
2	BANDARA ABD SALEH						
	- Bongkar	Kg	482.618	662.735	923.161	1,317,453	1.382.239
	- Muat	Kg	152.058	84.779	204.767	224,481	303.178
	TOTAL ABD. SALEH	Kg	634.676	747.514	1.127.928	1.541.934	1.685.417
3	BANDARA BANYUWANGI						
	- Bongkar	Kg	-	-	-	-	-
	- Muat	Kg	-	-	-	-	-
	TOTAL BANYUWANGI	Kg	-	-	-	-	-
TOTAL JAWA TIMUR		Kg	48.434.938	57.438.015	87.780.133	87.949.366	129.241.018

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Bandara Blimbingsari Banyuwangi masih difokuskan pada kegiatan pengangkutan penumpang sehingga belum terdapat kegiatan bongkar muat barang

KKOP adalah wilayah penerbangan sisi udara yang tidak dapat ditawarkan, sehingga mengantisipasi perkembangan wilayah perkotaan yang membutuhkan pembangunan vertikal, dibutuhkan adanya pengembangan Bandara Internasional (Sipil/Komersial) baru dengan Konsep Multiple Airporth yang mempunyai Triple Runway dengan luas \pm 1.000 Ha. Pembiayaan pembangunan Bandara tersebut dapat menggunakan Kerjasama Pemerintah Swasta dengan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Mengingat jalur penerbangan dari dan menuju Jawa Timur sudah mempunyai traffic yang jelas dengan gambaran keuntungan juga sudah jelas, maka diyakini investor yang berpengalaman mengelola Bandara Kelas Dunia akan tertarik untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kebijakan pembangunan Bandara kedepan adalah tuntutan penyediaan infrastruktur transportasi untuk menunjang efisiensi aktivitas para pelaku bisnis

4. Arus Perdagangan melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

Perkembangan perekonomian menuntut pergerakan barang yang semakin banyak volumenya, dan semakin cepat. Pada empat pelabuhan di Jawa Timur digambarkan terjadi peningkatan volume peti kemas yang bongkar muat yang tinggi. Sehingga diperlukan lahan pelabuhan yang cukup luas dan efisiensi aktivitas pelabuhan yang dikelola oleh operator. Tanpa itu semua, dikuatirkan kapal-kapal besar dari berbagai negara lebih memilih untuk bongkar muat di negara tetangga yang pada kenyataannya dapat memberikan pelayanan pelabuhan yang lebih efisien.

Tabel 2.96
Arus Perdagangan melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

Antar Pulau

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	PELABUHAN TANJUNG PERAK						
	BONGKAR	TON	1.934.796	1.602.470	2.153.341	2.124.535	2.273.252
	MUAT	TON	4.320.955	4.021.325	4.591.105	4.119.673	4.325.657
	JUMLAH TJ. PERAK	TON	6.255.751	5.623.795	6.744.446	6.244.208	6.598.909
2	PELABUHAN GRESIK						
	BONGKAR	TON	1.609.631	1.520.923	1.737.743	1.319.233	1.372.002
	MUAT	TON	3.078.463	3.232.386	3.361.682	3.596.999	3.776.849
	JUMLAH GRESIK	TON	4.688.094	4.753.309	5.099.425	4.916.232	5.148.852
3	PELABUHAN PROBOLINGGO						
	BONGKAR	TON	63.551	86,892	100.604	119.719	126.902
	MUAT	TON	132.373	125,017	175.296	208.602	219.032
	JUMLAH PROBOLINGGO	TON	195.924	211,909	275.900	328.321	345.934
4	PELABUHAN TANJUNG WANGI						
	BONGKAR	TON	241.869	932.711	812.183	749.425	771.908
	MUAT	TON	1.306.271	1.873.208	1.777.139	1.986.706	2.086.041
	JUMLAH TJ. WANGI	TON	1.548.140	2.805.919	2.589.322	2.736.131	2.857.949
TOTAL JAWA TIMUR		TON	12.687.909	13.394.932	14.709.093	14.224.892	14.951.644

Eksport Import

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	PELABUHAN TANJUNG PERAK						
	EKSPORT	TON	863.967	811.002	678.793	694.990	729.740
	IMPORT	TON	3.302.189	3.939.264	5.654.802	7.116.262	8.539.514
	JUMLAH TJ. PERAK	TON	4.166.156	4.750.266	6.333.595	7.811.252	9.269.254
2	PELABUHAN GRESIK						
	EKSPORT	TON	-	-	-	-	-
	IMPORT	TON	-	-	-	-	-
	JUMLAH GRESIK	TON	-	-	-	-	-
3	PELABUHAN PROBOLINGGO						
	EKSPORT	TON	-	-	-	-	-
	IMPORT	TON	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROBOLINGGO	TON	-	-	-	-	-
4	PELABUHAN TANJUNG WANGI						
	EKSPORT	TON	7.085	18.580	25.279	23.328	24.494
	IMPORT	TON	828.763	1.090.414	1.112.877	1.258.481	1.384.329
	JUMLAH Tg. WANGI	TON	835.848	1.108.994	1.138.156	1.281.809	1.408.824
TOTAL JAWA TIMUR		TON	5.002.004	5.859.260	7.471.751	9.093.061	10.678.077

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : pelabuhan Gresik dan Probolinggo merupakan pelabuhan interinsuler (antar pulau). Sarana dan prasarana eksisting belum mampu untuk mengakomodasi kegiatan ekspor impor

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

1. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 jumlah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi peraturan

daerah adalah 36 kabupaten/kota dengan rasio 0,9474 atau 94,74% dibandingkan dengan jumlah peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota pada tahun 2012 adalah 33 kabupaten/kota dengan rasio 0,8684 atau 86,84%. Perkembangan jumlah Kabupaten/Kota yang telah melalui proses evaluasi RTRW yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Rasio Progress Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Tahun 2010 s.d 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Jumlah Perda RTRW	11	16	33	36
2.	Jumlah Kabupaten/Kota	38	38	38	38
3.	Rasio (1/2)	0,2894	0,4210	0,8684	0,9474

Sumber data : Bappeprov Jatim tahun 2013

Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Rencana Umum Tata Ruang perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang.

Berkaitan dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang beserta Peraturan Zonasinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 50 RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah dievaluasi untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Gubernur.

2. Luas Wilayah Industri

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

Perkembangan luas kawasan industri di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia. Sampai tahun 2013, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Jawa Timur baru mencapai 1.758 Ha, atau baru mencapai 0,05 persen dari yang direncanakan sebesar 0,21 persen untuk menampung seluruh industri di Jawa Timur. Adapun luas Kawasan Industri yang telah dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana berikut.

Tabel 2.98
Luas Kawasan Industri yang telah Dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan Industri	Luas yang Dikembangkan (Ha)
1	Surabaya	Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	245
2	Sidoarjo	Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)	87
3	Pasuruan	Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)	500
4	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 1 (NIP)	220
5	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 2 (NIP)	230
6	Gresik	Maspion Industrial Estate	341
7	Gresik	Kawasan Indutri Gresik (KIG)	135
Jumlah			1.758

Sumber : Pengelola Kawasan Industri (PT. SIER, NIP, Maspion, KIG)

3. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan di provinsi Jawa Timur menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh.

Berdasarkan hasil olah data survei Potensi Desa (Podes), diperoleh data mengenai luas wilayah perkotaan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai tahun 2012, sebesar 20,66 persen atau seluas 7.491,96 km² dari seluruh luas rencana wilayah di Jawa Timur yang seluas 36.257 km².

4. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif Jawa Timur meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031, luas wilayah produktif di provinsi Jawa Timur seluas 2.741.542,01 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas ±2.020.490,71 Ha, wilayah perkebunan seluas ±359.481 Ha, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas ±361.570,30. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 61,81%, dimana angka rasio ini menunjukkan 61,81% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

2.1.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Perkembangan jumlah hotel/penginapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut : 1.149 (2009); 1.151 (2010); 1.294 (2011); 1.309 (2012); dan 1.453 (2013).

2.1.4.2.4 Lingkungan Hidup

1. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak, sedangkan Air Minum (*Drinking Water*) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat *urgent* karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah

tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit *cholera*, *typhus*, disentri dan penyakit kulit.

Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 93 persen dan meningkat menjadi sekitar 95 persen di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

2.1.4.2.5 Komunikasi dan Informasi

1. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Tabel 2.99
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Penerangan Utama Tahun 2009-2013

Alat Komunikasi	2009	2010	2011	2012	2013
Listrik (PLN & Non PLN)	98,61	98,97	99,30	99,57	99,79
Non Listrik	1,39	1,03	0,70	0,43	0,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas.

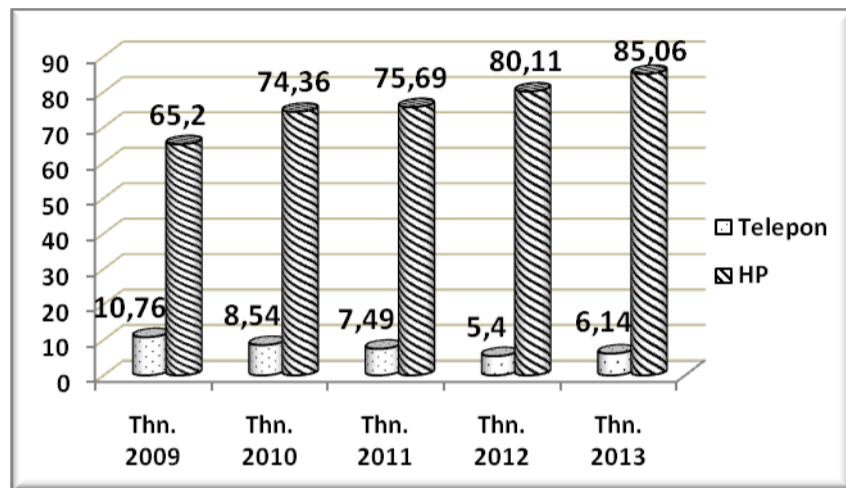
Pada lima tahun terakhir (2009–2013) persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan Non PLN) terus meningkat walaupun peningkatannya kecil. Hingga tahun 2013 hampir seluruh rumah tangga di Jawa Timur (99,79 persen) bisa menikmati listrik.

2. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan

teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa.

Gambar 2.44
Persentase Rumah tangga yang Menggunakan
Alat Komunikasi Telepon dan Yang Menggunakan
HP di Jawa Timur, Tahun 2009 -2013



Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

Rumah tangga yang menggunakan telepon di Jawa Timur periode 2009-2012 menunjukkan penurunan, yaitu dari 10,76 persen pada tahun 2009 menjadi 5,4 persen tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,14 persen. Sebaliknya rumah tangga yang menggunakan telepon genggam/HP terus meningkat, Pada tahun 2009 persentasenya 65,2 menjadi 85,06 pada tahun 2013.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Sistem Informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

Pelayanan perijinan di Jawa Timur dipusatkan pada UPT Pelayan Perizinan Terpadu (P2T), salah satu perizinan yang dilayani oleh UPT P2T adalah Izin Pemanfaatan Ruang. Izin Pemanfaatan Ruang diberikan kepada Pemohon yang akan melakukan pembangunan di kawasan pengendalian ketat skala regional di Provinsi Jatim. Sampai dengan tahun 2014 ini, jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebanyak 147 Izin.

Tabel 2.100
Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan

No	Tahun	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
1	2010	26
2	2011	38
3	2012	32
4	2013	51
JUMLAH		147

Sumber : UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, 2014

2. Perkembangan Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam lima tahun terakhir, jumlah unjuk rasa berfluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2009-2010 jumlah unjuk rasa menunjukkan peningkatan dari 406 kasus menjadi 567 kasus, kemudian menurun menjadi 490 kasus pada tahun 2011 dan selanjutnya terus meningkat menjadi 597 kasus (2012) dan 770 kasus (2013). Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Di Jawa Timur, kejadian unjuk rasa disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, kebebasan berserikat, pelaksanaan outsourcing, beberapa masalah masyarakat seperti isu kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D-4, S1, S2 dan S3.

Tabel 2.101
Rasio Lulusan D-4/S1/S2/S3
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Laki-Laki	18.241.264	18.532.256	18.639.561	18.740.054	18,777,377
	Perempuan	18.994.885	18.944.501	19.048.061	19.312.896	19,255,558
	Jumlah Penduduk	37.236.149	37.476.757	37.687.622	38.052.950	38,032,934
2.	Laki-Laki Lulusan D4/S1/S2/S3	614.395	625.422	628.292	723.525	689,225
	Perempuan Lulusan D4/S1/S2/S3	511.371	535.910	558.760	615.711	582,786
	Jumlah Lulusan D4/S1/S2/S3	1.125.766	1.161.332	1.187.052	1.339.236	1,272,011
3	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Laki-Laki	337	337	337	386	367
	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Perempuan	269	283	293	319	303
	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3	302	310	315	352	334
	Sex rasio Lulusan D4/S1/S2/S3	120	117	112	118	118

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

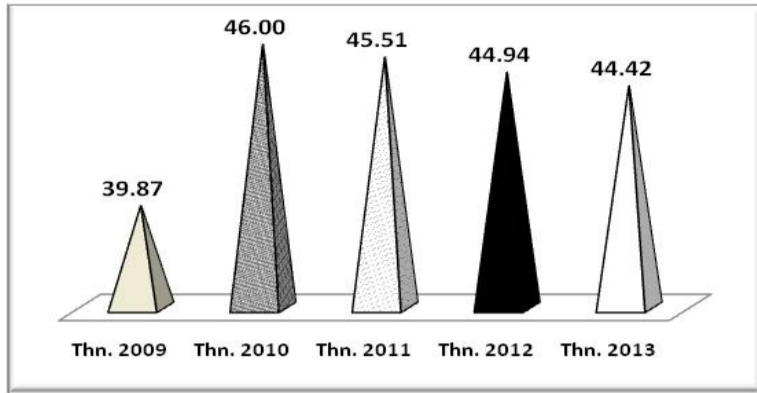
Rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 selama 2009-2013 berkisar antara angka 302-334 per 10.000 penduduk, dan angkanya menunjukkan adanya kecenderungan terus meningkat. Kalau dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2009-2012, lulusan D-4/S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal ini terlihat dari angka *sex ratio* lulusan D-4/S1/S2/S3 nilainya diatas 100 persen. *Sex ratio* lulusan D-4/S1/S2/S3 pada tahun 2009 sebesar 120 persen menjadi 118 persen di tahun 2013. Kondisi ini memberikan gambaran masih adanya ketimpangan gender pada bidang pendidikan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pension).

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.45
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 - 2013



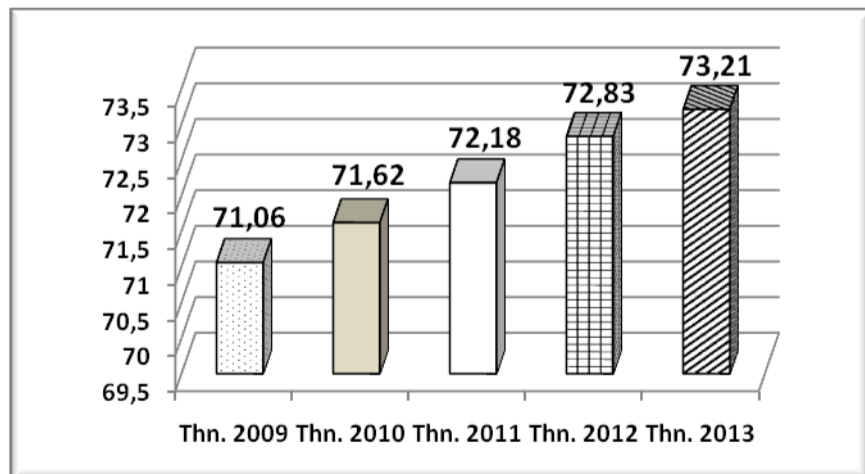
Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

Pada tahun 2013, angka DR untuk Jawa Timur sebesar 44,42 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka DR menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.4.4.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indkes komposit yang mencakup tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu kesehatan (Angka Usia Harapan Hidup), pencapaian tingkat pendidikan (Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Gambar 2.46
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2009-2013 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 71,06, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 71,62 (2010); 72,18 (2011); 72,83 (2012) dan pada tahun 2013 mencapai 73,21.

Kenaikan IPM ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan manusianya, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.